

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal pada dasarnya merupakan instrumen yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan negara dan bukan tujuan bernegara itu sendiri. Instrumen ini digunakan agar pencapaian tujuan bernegara, yaitu kesejahteraan masyarakat, dapat lebih mudah dicapai. Oleh karena itu, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dilakukan dengan menempatkan motor penggerak pembangunan pada tingkatan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu Pemerintah Daerah. Dekatnya tingkat pemerintahan dengan masyarakatnya diharapkan dapat membuat kebijakan fiskal daerah akan benar-benar sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas daerah (Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011).

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Sasana, 2006), selain itu (Syahrudin, 2006) mengungkapkan bahwa desentralisasi fiskal adalah merupakan kewenangan (*authority*) dan tanggung jawab (*responsibility*) dalam penyusunan, pelaksanaan, dan

pengawasan anggaran daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh pemerintah daerah.

Dana perimbangan dapat diartikan sebagai *block grant* atau transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimana penggunaan sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah, sedangkan dalam hubungan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pemerintah pusat ikut campur tangan langsung atas penggunaannya. Hubungan ini dapat dikatakan semacam *joint venture* antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Suryanto, 2010).

Menginvestigasi hubungan antara desentralisasi fiskal dan tata kelola dengan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah penting dan menarik dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, desentralisasi fiskal berhubungan dengan aliran dana milik masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan penggunaan dan pengelolaannya kembali kepada publik sebagai *ultimate owner* pemerintah (Syahrudin, 2006). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (Suryanto, 2010).

Dalam konteks Indonesia, desentralisasi ditandai dengan perubahan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 25 tahun 1999 yang kemudian Undang Undang tersebut disempurnakan menjadi Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Implementasi otonomi daerah ini menimbulkan berbagai permasalahan karena daerah memiliki kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda baik dari sisi keuangan, ketersediaan infrastruktur maupun kapasitas sumberdaya manusia (Syahrudin, 2006). Implementasi akuntabilitas di Indonesia pada prinsipnya telah dilaksanakan secara bertahap dalam lingkungan pemerintahan. Dukungan peraturan-peraturan yang berhubungan langsung dengan keharusan penerapan akuntabilitas di setiap instansi pemerintah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya melakukan reformasi birokrasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasi akuntabilitas seperti masih rendahnya kesejahteraan pegawai, faktor budaya, dan lemahnya penerapan hukum di Indonesia (Suryanto, 2010).

Dalam penelitian Amy dan Hilda (2014) dari sisi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan penilaiannya oleh Kementrian Dalam Negeri secara umum terlihat penurunan jumlah Pemda yang tidak melaporkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan secara rata-rata terjadi peningkatan indeks kinerja pemda kabupaten/kota

di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola penyelenggaraan pemerintah kabupaten kota di Indonesia mengalami perbaikan, akan tetapi pada penelitian (Moisiu, 2013) pada beberapa negara justru ditemukan tingkat korupsi yang semakin tinggi pasca implementasi desentralisasi fiskal. Dalam bahasa awam, persoalan desentralisasi fiskal tersebut dapat dirumuskan dalam kalimat pertanyaan sebagai berikut: sejauh manakah pertanggungjawaban pemerintahan daerah atas seluruh anggaran yang telah dibelanjakannya, guna mencapai tujuan otonomi daerah ? (Suryanto, 2010).

Penelitian ini menganalisis **Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia**, yang diharapkan memberi gambaran kepada masyarakat mengenai dampak desentralisasi fiskal pada akuntabilitas laporan keuangan pada pemerintahan daerah di Indonesia sehingga masyarakat juga berperan dalam penyelenggaraan desentralisasi seperti pada penelitian (Martiningsih, 2008). Dalam konteks daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah bagian dari evaluasi kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, yang akan diproyeksikan untuk perencanaan tahun selanjutnya. LKPD juga menjadi sumber informasi bagi *stakeholders* sehingga ketepatan dan kemampuan Sumber daya Manusia (SDM) penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan yang ada.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Amy dan Hilda mengenai Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia dengan hasil secara umum ditemukan bahwa desentralisasi fiskal dalam bentuk tingkat kemandirian daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah berpengaruh positif terhadap kemungkinan tingginya akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Secara parsial terkait peran moderasi kinerja, ditemukan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah memperlemah pengaruh negatif tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat terhadap kemungkinan tingginya akuntabilitas pelaporan keuangan dalam bentuk opini audit yang baik. Dengan penambahan variable rasio efektivitas yang merupakan salah satu instrumen dari desentralisasi fiskal dan merubah tahun penelitian menjadi 2012-2013 diharapkan memperkuat penelitian sebelumnya.

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah desentralisasi fiskal dan kinerja, desentralisasi fiskal diproksikan dengan kemandirian daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan efektivitas untuk kinerja dapat dijelaskan dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut maka didapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah efektivitas berpengaruh positif terhadap terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah kinerja dalam memoderasi kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah?
6. Apakah kinerja dalam memoderasi ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris.

1. Kemandirian daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Efektivitas berpengaruh terhadap terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
4. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
5. Kinerja dalam memoderasi kemandirian daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
6. Kinerja dalam memoderasi ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi akademisi diharapkan memberikan informasi mengenai dampak dari diterapkannya desentralisasi fiskal dan pengaruh kinerja terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah sehingga dapat menjadi bahan rujukan dalam pengembangan pada penelitian selanjutnya, selain itu juga dapat sebagai bahan bacaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi sektor publik.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah yang selanjutnya diterapkan

untuk meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah yang ada di Indonesia.

b. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian diharapkan memberikan masukan mengenai dampak diterapkannya desentralisasi fiskal, dan pengaruh kinerja sehingga didapatkan solusi terhadap masalah yang timbul dari diterapkannya kebijakan tersebut.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberi pengertian informasi mengenai keakuntabilisan laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah yang menjadi bahan pertimbangan dan menetapkan bahwa pemerintah daerah tersebut sudah memanfaatkan dan mengelola keuangannya secara benar.